

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Soedirman Melawan sebagai respons terhadap kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT). Fokus utama yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mahasiswa dalam menentang kebijakan tersebut dan bagaimana bentuk konkret dari implementasi Gerakan 29 April di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap 8 informan utama dan 2 informan tambahan, serta diperkuat dengan teori-teori gerakan sosial serta pengkajian mengenai neoliberalisme.

Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa Unsoed yang tergabung dalam Aliansi Soedirman Melawan memainkan peran penting sebagai aktor dari Gerakan 29 April yang bertujuan menentang kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Peran tersebut tercermin dari kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi ketimpangan yang muncul akibat kebijakan tersebut, membangun konsolidasi lintas 12 fakultas, menyuarakan kritik melalui forum audiensi dan media sosial, serta mengorganisir aksi massa sebagai bentuk perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa tidak hanya menjadi representasi keresahan kolektif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa isu mengenai pendidikan ke ruang publik dan menhidupkan kembali semangat demokrasi di ranah kampus.

Implementasi dari Gerakan 29 April menunjukkan bahwa gerakan sosial mahasiswa dapat bergerak secara terstruktur, dimulai dari edukasi isu kawalan, penyusunan narasi perlawanan, hingga puncaknya aksi demonstrasi dan audiensi formal. Aksi simbolik berupa pendudukan gedung rektorat dan penyampaian tuntutan secara terbuka merupakan bagian dari taktik gerakan yang mencerminkan kesadaran simbolik dan politis mahasiswa terhadap ruang kekuasaan. Walaupun capaian dari gerakan ini belum bersifat sistemik, pembatalan kenaikan UKT di tingkat institusi menjadi bentuk keberhasilan minimal yang menunjukkan pengaruh mahasiswa terhadap kebijakan kampus.

Secara keseluruhan, gerakan Aliansi Soedirman Melawan mencerminkan dinamika gerakan sosial kontemporer yang tidak hanya menolak kebijakan secara reaktif, tetapi juga menentang arah neoliberalisme dalam pendidikan tinggi. Gerakan ini telah membangun

kesadaran baru di kalangan mahasiswa bahwa pendidikan bukanlah komoditas, melainkan hak yang dijamin oleh negara. Dengan menggabungkan peran analitis, organisasi yang kolektif, serta strategi yang terukur, mahasiswa dapat menunjukkan bahwa kampus tetap menjadi ruang perlawanan terhadap ketidakadilan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan dan pandangan masyarakat mengenai gerakan sosial yang dijalankan oleh mahasiswa yang bertujuan menekan birokrasi untuk berpihak kepada rakyat dan lebih mengadaptasi prinsip berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai topik "Gerakan Sosial Aliansi Soedirman Melawan: Studi Kasus Gerakan 29 April sebagai Perlawanan terhadap Kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024", penulis merasa masih ada beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan dan diperdalam mengenai topik penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa mahasiswa yang masih dalam masa studi untuk melakukan validasi informasi dan data terhadap kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024
2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mewawancarai pihak birokrasi lebih banyak (secara jumlah informan) untuk memahami lebih dalam sudut pandang mereka terhadap dinamika biaya pendidikan tinggi.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara kebijakan yang menyasar pada neoliberalisme pendidikan seperti Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan kebijakan lainnya yang berprinsip berkeadilan dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat di negara lain.